



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DONNY YUNIARTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **137506**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 425.500.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, _ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4G Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.325.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.325.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpn.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.